

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI OLEH PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

**Rio Purnama**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*  
Email : riopurnama@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Oleh Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis”. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih terjadi beberapa masalah dalam pelaksanaan Kebijakan Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Oleh Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tugas fungsi dan tata kerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang tugas, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi Oleh Pegawai Dinas komunikasi dan Informasi Kabupaten Ciamis? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Variabel menggunakan Metter dan Horn. Informan sebanyak 5 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data dikumpulkan sendiri oleh peneliti di lapangan dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan dan data sekunder yaitu data laporan, atau dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Oleh Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis masih terhambat oleh kurangnya sumber daya. Masih terhambat oleh aspek eksternal yaitu , situasi dan kondisi politik yang terjadi di lingkungan Diskominfo Ciamis. Dengan kondisi tersebut, penulis memberikan saran terhadap Diskominfo untuk lebih membangun komunikasi dengan baik di lingkungan kerja, lebih profesional dalam penempatan ASN sesuai dengan latar belakang pendidikannya.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Diskominfo*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom diberikan kebebasan untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kecuali hal-hal yang menjadi kewenangan mutlak

pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat mempunyai hak otonomi seperti Kabupaten/Kota lainnya. Dalam hal

menjalankan otonominya, Kabupaten Ciamis dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tugas dan fungsinya jelas serta fokus arah kebijakan lebih tepat sasaran.

Dinas komunikasi dan informatika (Kominfo) merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, statistik dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati. Dalam hal penyampaian informasi publik, Diskominfo memiliki peranan sangat penting dalam memajukan kesejahteraan rakyat Ciamis.

Dinas komunikasi dan informatika menjadi garda terdepan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan. Pasalnya Diskominfo adalah yang menyajikan data dan informasi kepada publik terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Tugas fungsi dan tata kerja unsur organisasi oleh pegawai dinas harus dilakukan dengan baik agar semua kewajibannya dapat terlaksana dengan baik.

Tugas fungsi dan tata kerja unsur organisasi Diskominfo Kabupaten Ciamis secara eksplisit sudah dituangkan dalam Peraturan Bupati Ciamis No 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika. Artinya, segala bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh

Diskominfo Kabupaten Ciamis sudah jelas dijabarkan dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun fakta di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Bupati yang dituangkan dalam Peraturan Bupati. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor penghambat baik secara internal maupun eksternal.

Menurut Van Meter dan Van Horn 1975 dalam Winarno (2012 :149) Implementasi kebijakan diartikan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.” Artinya, peraturan yang sudah ada untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Diskominfo harus dilaksanakan dengan baik oleh para implementator yang dalam hal ini adalah para Pegawai Dinas dari mulai Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan seluruh staff yang ada.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya ada variabel-variabel yang harus dicapai agar kebijakan yang dibuat dapat diukur keberhasilannya. Variabel implementasi kebijakan secara gamblang dijelaskan oleh Metter dan Horn yaitu : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik para agen pelaksana, sikap/kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial ekonomi politik.

Apabila variabel tersebut dapat terpenuhi, maka kebijakan tentang tugas, fungsi dan tata organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil observasi, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam menjalankan tugas fungsi dan tata kerja di lingkungan Dinas Kominfo yaitu kurangnya kecekatan pegawai kominfo dalam mengakses data dan pembuatan laporan. Menurut data dari Dinas Kominfo Kabupaten Ciamis indikator permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan tugas yang telah di berikan, sehingga membuat pekerjaan menumpuk. Hal inilah yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- b. Kurangnya komunikasi antar pegawai tentang pengarahan tata kerja yang seharusnya dilakukan sehingga membuat miskomunikasi antar pegawai. Dalam hal menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja organisai diperlukan komunikasi yang baik antar pegawai untuk mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Adapun kurangnya komunikasi yang dibangun oleh sesama pegawai akan menghambat dalam proses pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kedekatan antar pegawai dinas.

- c. Tidak jelasnya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab di lapangan yang dibebankan kepada Dinas Kominfo yang menimbulkan kesalahan Informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Implementasi Kebijakan Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja unsur Organisasi Oleh Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.**

Tujuan dari penelitian ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang tugas, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi oleh pegawai Dinas komunikasi dan Informasi Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan tentang tugas, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi oleh pegawai Dinas komunikasi dan Informasi Kabupaten Ciamis.

Untuk mengetahui Upaya-upaya Implementasi Kebijakan tentang tugas, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi oleh pegawai Dinas komunikasi dan Informasi Kabupaten Ciamis.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Kebijakan**

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh

seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku aktor-aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Definisi kebijakan publik sangat beragam dalam literatur ilmu politik. Pada dasarnya, semua definisi kebijakan memberi penekanan-penekana yang berbeda. Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan ( *wisdom* ), karena kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah.

Laswell dan Abraham Kaplan ( 1970 :71 ) “Kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan prkatik-praktik tertentu.” (Nugroho, 2011 : 93)

Menurut Anderson, konsep kebijakan mempunyai beberapa implikasi, pertama titik perhatian kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan, kedua kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan sendiri, ketiga kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, keempat kebijakan publik bisa bersifat positif maupun negatif.

Kebijakan publik merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan –kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dikaji mulai dari *policy process*, *policy implementation*, dan *policy evaluation* . *Policy implementation* membahas tentang suatu program kebijakan yang harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan dapat mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yaitu dengan langsung mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan.

“Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.” ( Lester dan Stewart dalam Winarno, 2012 : 147 )

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa,

“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan ( *benefiit* ) atau suatu jenis keluaran yang nyata ( *tangible output* ). Istilah implementasi merujuk pada sejumlah

kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.” (Ripley dan Franklin 1982, Winarno, 2012 : 148)

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa,

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.” (Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 1979, Solichin, 2004 :68 )

Lebih lanjut lagi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa,

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”(Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 1979, Solichin, 2004 :65 )

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengemukakan implementasi kebijakan yaitu,

“Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau

kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.” (Van Meter dan Van Horn 1975, Winarno 2012 :149)

Dari beberapa pandangan para ahli di atas, penulis kembali mengambil intisari tentang implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan dari kebijakan publik baik itu berupa undang-undang, peraturan atau keputusan-keputusan eksekutif. Implementasi kebijakan publik merujuk pada serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

### **3. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Pada dasarnya, implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang dikenalkan oleh para ahli kebijakan. Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu. Dalam model implementasi akan digambarkan komponen-komponen yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut, dan bagaimana korelasi antar komponen. Berikut merupakan komponen model implementasi. Pertama, program ( kebijakan ) yang dilaksanakan. Kedua, *target groups* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, baik perubahan atau peningkatan. Ketiga, unsur pelaksana baik organisasi maupun perseorangan

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi. Keempat, faktor lingkungan baik fisik, sosial, budaya dan politik.

Model pertama dikenalkan oleh Van Meter dan Van Horn. Model yang dikenalkan oleh Van Meter dan Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

#### **4. Unsur-unsur Implementasi**

Unsur-unsur implementasi kebijakan publik yang mutlak harus ada adalah,

“Unsur pelaksana, program yang dilaksanakan dan *target group*.” ( Abdullah 1988, Smith 1977 dalam Tachjan 2008 : 26 ) Unsur pelaksana merupakan pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan adalah unit-unit administratif dan unit-unit birokrasi. Unit administratif dan unit birokrasi ini berfungsi sebagai alat yang berkaitan dengan proses kebijakan publik dilakukan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya, unit administratif dapat melakukan berbagai tindakan, mulai dari :

“Penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian pergerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan

penilaian.” (Dimock&Dimock 1984,Tjokroamidjojo 1974, Siagian 1985, Tachjan 2008:28)

Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran serta berbagai macam sarana perlu dijabarkan ke dalam program-program yang bersifat operasional agar tujuan kebijakan dapat diimplementasikan. “*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect.*” ( Grindle 1980, Nugroho 2008:31)

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci lebih menggambarkan pola alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

### **5. Kebijakan Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja**

#### **1. Tugas pokok**

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasi dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan informatika, Persandian, dan statistik daerah sesuai dengan kewenangannya.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika Publik, bidang penyelenggaraan E-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian.

Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

#### **1. Desain Penelitian**

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan dapat menggambarkan secara gamblang bagaimana implementasi kebijakan tentang tugas fungsi dan tata kerja unsur organisasi oleh pegawai Dinas

Komunikasi dan Informatika Ciamis. Dengan metode kualitatif ini, penulis dapat menafsirkan setiap kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan dari sudut pandang aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

#### **2. Fokus Penelitian**

Variabel yang dijadikan sebagai fokus kajian dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Oleh Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

#### **3. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kemudian dikumpulkan dan kemudian diolah oleh penulis.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sehingga beberapasumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka yaitu mengumpulkan data yang bersumber pada buku-buku, literatur, hasil penelitian, jurnal serta dokumentasi mengenai teori, konsep serta kaidah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi

##### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menyeleksi data yang diperoleh

dilokasi penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 6. Teknik Pengolahan/Analisi Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman, dimana menurutnya aktivitas analisis data dibagi atas; *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification*.

## 7. Jadwal Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan penelitian direncanakan selama bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber daya manusia sebagai implementator masih belum memiliki kecakapan yang memadai untuk ditempatkan diposisi tertentu. Hal ini terjadi karena proses politik yang masih kental di lingkungan Diskominfo Kabupaten Ciamis. Mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati terpilih tidak memperhatikan latar belakang pendidikan, kecakapan, dan kemampuan seseorang yang akan menduduki jabatan tertentu. Akibat proses politik inilah mutasi jabatan tidak lagi menerapkan konsep "*the right man in the right place*". Sehingga proses implementasi kebijakan tentang tugas, fungsi dan tata organisasi Diskominfo Kabupaten Ciamis menjadi tidak sesuai dengan harapan karena orang-orang yang menduduki jabatan tertentu bukanlah orang yang tepat. Untuk memangkas hal tersebut memang sulit dilakukan. Karena hal tersebut seolah

sudah menjadi tradisi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

## KESIMPULAN

Sumber daya manusia sebagai implementator masih belum memiliki kecakapan yang memadai untuk ditempatkan diposisi tertentu. Hal ini terjadi karena proses politik yang masih kental di lingkungan Diskominfo Kabupaten Ciamis. Mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati terpilih tidak memperhatikan latar belakang pendidikan, kecakapan, dan kemampuan seseorang yang akan menduduki jabatan tertentu. Akibat proses politik inilah mutasi jabatan tidak lagi menerapkan konsep "*the right man in the right place*". Sehingga proses implementasi kebijakan tentang tugas, fungsi dan tata organisasi Diskominfo Kabupaten Ciamis menjadi tidak sesuai dengan harapan karena orang-orang yang menduduki jabatan tertentu bukanlah orang yang tepat. Untuk memangkas hal tersebut memang sulit dilakukan. Karena hal tersebut seolah sudah menjadi tradisi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Cresswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.



- Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nazir. (2000). *Metode Penelitian Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Harsono. (2010). *Perencanaan Kepegawaian*. Bandung: Fokus Media.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Idrus, Muhamad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- .(2011). *Public Policy : dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta : Gramedia.
- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik ( Public Policy )*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Kaho, Josef Riwu. (2002). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia: Indentifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sarundajang. (2001). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Silalahi, Ulber. (2009) . *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Labolo, Muhadam. (2013). *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori Konsep, dan pengembangannya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sinaga, Obsatar. (2010). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik : Implementasi Kerja Sama Internasional*. Bandung : Lepsindo.
- Soeharto, Irawan. (2011). *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik*

- Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Subarsono,AG. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta:UGM Press
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung. Alfabeta.
- Sulaeman.Affan. (1998). *Public policy-Kebijakan Pemerintahan.* bandung. BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta : PT Grasindo.
- Syafiie, Inu Kencana. (2011), *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Bandung: PT Refika Aditama.
- Usman, Husein. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung : AIPI Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta : PT Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_.(2015). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik Teori dan Proses.* Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.